

# STUDI PEMETAAN DAN PEMECAHAN MASALAH DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PADA INSTITUSI PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA

Moh. Ali Andrias  
Akhmad Satori

Universitas Siliwangi Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya 45116  
muhamadali@unsil.ac.id

## Abstrak

Artikel ini merupakan hasil penelitian yang membahas mengenai implementasi pendidikan karakter pada institusi pendidikan di tingkat SMP, SMA dan Sederajat di Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian ini berupaya meminimalisir, bahkan diupayakan mampu menghilangkan masalah yang selalu terjadi pada siswa di sekolah seperti tawuran, aksi geng motor, bullying, narkoba, dan pelecehan seksual. Permasalahan di kota yang dilabeli "Kota Santri" ternyata masih ada perilaku siswa yang melakukan tindakan negatif. Oleh karena itu, etika, moralitas, dan nilai-nilai agama dan Pancasila, sebagai filosofi dan nilai-nilai yang luhur pada bangsa Indonesia harus ditingkatkan kembali. Penanganan serius dari institusi pendidikan, menggalakan penyampaian pendidikan karakter yang terintegrasi pada semua mata pelajaran dan guru di sekolah. Pemberian pendidikan karakter ini harus dipetakan kembali dan mencari pemecahan solusi yang tepat dan terarah oleh institusi pendidikan maupun pemerintah. Pendidikan karakter ini harus dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi dan serius pada proses belajar mengajar di kelas. Pendidikan di Kota Tasikmalaya diharapkan fokus pada penguatan pendidikan karakter yang memiliki daya untuk mengubah perilaku siswa.

**Kata Kunci :** Pendidikan Karakter, Berkelanjutan, Perilaku Siswa

## Abstract

*This article is the result of research discussing the implementation of character education in educational institutions in junior high, high school and equivalent in the city of tasikmalaya. The results of this study seeks to minimize, even strived to eliminate the problems that always occur in students at schools like brawl, the action of motorcycle gangs, bullying, drugs, and sexual harassment. The problems in the city that is labeled "Kota Santri" behavior there are still students who undertake negative actions. Therefore, ethics, morality, and religion and the values of pancasila, as the philosophy and values are sublime in the indonesian nation must be scaled back. Serious treatment from educational institutions, promoting the delivery of an integrated character education in all subjects and teachers at school. The provision of education should be re-mapped characters and find solutions appropriate solutions and targeted by educational institutions and government. This character education must be sustainable, integrated and serious in teaching and learning in the classroom. Education in tasikmalaya city is expected to focus on strengthening character education has the power to change the behavior of students.*

**Keywords:** Character education, Sustainable, Student behavior

Euforia demokratisasi yang sudah berlangsung 15 tahun terakhir ini. Belum diikuti dengan "kedewasaan politik" dan kesadaran hidup nilai-nilai Pancasila. Kondisi sosial

politik di Tanah Air cenderung mengalami disintegrasi sosial. Karena ternoda konflik sosial dan agama. Lenyapnya nilai-nilai filosofis Pancasila telah menimbulkan ke-

prihatinan, sebagai bangsa yang memiliki ragam kultur dan agama, rawan menimbulkan berbagai persoalan. Keanekaragaman (pluralisme) budaya, suku, dan bahasa di Indonesia ini, “ibarat api dalam sekam”, permasalahan sosial atau konflik bisa muncul kapan saja (bahaya laten). Persoalan ini semakin krusial jika masyarakat sulit menemukan kesepakatan dalam menghadapi permasalahan yang muncul.

Miniatur permasalahan sosial yang dianggap krusial di berbagai wilayah Indonesia, adalah munculnya kasus di kalangan siswa sekolah seperti tawuran, *bullying*, pelecehan seksual, geng motor serta narkoba. Permasalahan yang terjadi sekolah jika tidak diselesaikan secara berkesinambungan dan serius, baik kalangan guru maupun pemerintah. Maka akan tidak mungkin akan menjadi permasalahan sosial yang lebih besar. Sebab unit terkecil (sekolah) selain keluarga, seharusnya sebagai institusi utama dan wajib untuk mampu dan menghasilkan karakter siswa yang berakhlak ataupun bermoral sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai konstitusi dasar Negara Indonesia.

Kemudian yang menjadi kritikan bagi sistem pendidikan di Indonesia terutama bagi pemerintah saat ini, adalah sistem pendidikan yang menghasilkan (luaran/output) peserta didik dengan lulusan dengan nilai tertinggi atau hanya sekedar batas kelulusan pada Ujian Nasional (UN). Namun korelasi hasil nilai tinggi dengan etika dan moralitas tidak linier dengan implementasi yang ada. Sehingga bagi peserta dan pendidik

di sekolah berlomba-lomba meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan hasil nilai akhir, bukan pada proses mencapai nilai tersebut. Sehingga UN yang digelar kemarin penuh dengan kecurangan dari pendidik maupun peserta didik. Sehingga hilangnya nilai-nilai karakter siswa untuk jujur, bertanggungjawab, menghormati, serta tindakan positif lainnya.

Sementara pada penelitian ini, permasalahan ini difokuskan di Kota Tasikmalaya yang hampir sama dalam sistem pendidikannya dengan wilayah lain. Namun keunikan kota ini yakni mempunyai label “Kota Santri” yang terdapat ratusan pesantren. Permasalahan yang memiliki label kota santri tidak berpengaruh dengan adanya permasalahan sosial, salah satu kasus yang cukup memprihatinkan yakni melibatkan siswa sekolah yang tergabung geng motor. Di suatu pemberitaan “Geng Motor Tasik Makin Brutal” di Kompas.com pada 5 Maret 2012, peristiwa kelompok bermotor remaja (usia 16-18 tahun), yang melakukan penganiayaan hingga berujung kematian telah menyita publik. Peristiwa yang terjadi pada 5 Maret 2012, warga Padanaan, Cibalanarik, Tanjungjaya menjadi korban. Kemudian munculnya aksi penjambretan warga Nyantong, Mugarasari, Tamansari. Serta aksi-aksi lain yang merusak fasilitas pemukiman yang telah meresahkan warga di Tasikmalaya.

Fenomena tersebut tidak saja masalah kenakalan remaja, namun menunjukkan kemunduran perilaku, sehingga perlu penanganan serius semua pihak baik dari kelu-

arga, sekolah, maupun pemerintah. Upaya membangkitkan wawasan kebangsaan ber-Pancasila yang dipadukan pendidikan karakter Pancasila, sebagai upaya pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak mulia. Implementasi pendidikan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak sekolah di Kota Tasikmalaya tapi di seluruh daerah di Indonesia, serta dijadikan kebijakan pemerintah yang lebih intensif di tataran operasional.

Salah satu misi mewujudkan visi bangsa Indonesia telah termuat dalam peraturan pemerintah, yakni mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggungjawab. Amanah ini sudah dijabarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dari berbagai sumber dan pandangan pakar pendidikan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah, para pakar berbeda pendapat menyikapi kebijakan pemerintah tersebut. Setidaknya ada tiga pendekatan yang berkembang. Pertama, Pendidikan Karakter diberikan berdiri sendiri sebagai suatu mata pelajaran khusus. Kedua, Pendidikan Karakter diberikan secara terintegrasi dalam mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, agama dan mata pelajaran lain yang relevan. Pendapat ketiga, Pendidikan Karakter bangsa terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran. Menyikapi hal tersebut diatas, setidaknya karena tuntutan pendidikan dan permasalah-

han sosial yang semakin kompleks, peneliti lebih memilih pendapat terakhir (ketiga). Realitasnya pendidikan karakter tidak berdiri sendiri, tetapi berintegrasi dengan pelajaran-pelajaran yang ada dengan memasukkan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa Indonesia.

Dengan pendidikan karakter ini diharapkan dapat dimulai dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada para siswa, berdasarkan nilai moral yang luhur sesuai dengan karakter kebangsaan. Para pelajar seharusnya dipertegas dalam proses pendidikannya agar jati diri atau karakter bangsa tidak hilang.

Berangkat dari latar belakang penelitian ini, peneliti menganggap pentingnya memetakan kembali (*mapping problem*) dan mencari solusi (*problem solving*) dalam implementasi pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar pada institusi pendidikan. Serta memberikan masukan informasi bagi pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang efektif, dalam implementasi pendidikan karakter secara intensif di sekolah-sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan menengah atas (SLTA) di Kota Tasikmalaya. sebagai kurikulum meningkatkan pendidikan karakter bagi siswa-siswa sekolah. Oleh karena itu dalam perumusan masalah ini. : 1) Bagaimana implementasi pihak sekolah di Kota Tasikmalaya dalam memberikan pendidikan karakter kepada siswanya, bagaimana model atau metode penerapan pendidikan karakter di sekolah, 2) Bagaimana kebijakan politik Dinas Pendidikan Kota

Tasikmalaya dalam mengimplementasikan dan menginstruksikan program pendidikan karakter kepada pihak sekolah.

### **Daya Saing Internasional dan Tantangan Terhadap Pendidikan Indonesia**

Kualitas dan pengembangan pendidikan di Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan dan perhatian organisasi dunia. Meskipun data UNESCO dan UNDP tidak hanya mengukur peringkat pendidikan saja, namun berkaitan dengan kesehatan dan penghasilan. Peringkat Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index/HDI*) komposisi pencapaian tiga sektor ini perkapita menunjukkan pengembangan manusia (HDI) di Indonesia mengalami pasang surut, namun dalam 10 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 (pada tahun 1996), naik tiga peringkat ke-99 (1997), kemudian turun 6 peringkat ke-105 (1998), dan semakin turun ke peringkat-109 (1999). Bahkan sampai tahun 2012 mengalami penurunan signifikan hingga peringkat 121 dari 187 negara. (Musrida, 2013)

Peringkat HDI (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia tahun 2013 mengalami peningkatan peringkat ke-108, atau naik hingga 13 peringkat dari peringkat ke-121 (tahun 2012). Lonjakan peringkat ini dianggap cukup signifikan bagi Indonesia. Namun jika dibandingkan dengan negara ASEAN misalnya Malaysia, HDI Malaysia tahun 2013 naik dua peringkat ke posisi 62. Malaysia diklasifikasikan sebagai negara

High Human Development (HHD) bergabung dengan Thailand, hanya selisih 5 peringkat dari Russia, sedangkan Indonesia masih Medium Human Development (MHD), masuk ke dalam kelompok negara Asia seperti Philipina, Vietnam, dan Timor Leste. (Malaysia Forum, 2014).

Namun perhitungan peringkat HDI ini bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak menjadi sebuah kelemahan. Akan tetapi menjadi tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi rakyat oleh pemerintahan baru (Jokowi-Jusuf Kalla) sekarang ini jika memiliki komitmen kuat. Tidak mustahil Indonesia akan masuk dalam kelompok negara HHD juga. Karena jika menilik pembangunan ekonomi dan pendidikan di negara tetangga seperti Malaysia ataupun Singapura, yang sebelumnya berada di bawah Indonesia. Kini setelah adanya komitmen besar dan kuat dari pemerintah maupun masyarakatnya, kedua negara tersebut kini jauh meninggalkan Indonesia.

Menurut survei *Political and Economic Risk Consultant* (PERC), kualitas pendidikan formal di Indonesia pada beberapa tahun lalu berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia, posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia (2000), Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Masih menurut survei dari lembaga tersebut, Indonesia berpredikat sebagai “follower” bukan sebagai pemimpin teknologi dari 53

negara di dunia. Namun predikat tersebut sebenarnya masih perlu diperdebatkan, karena pelajar Indonesia sering merebut beberapa medali di ajang Olimpiade sains dunia. Indonesia unggul dalam bidang fisika, hingga tahun 2013 sudah lebih dari 100 medali emas diraih. Setelah 20 tahun Indonesia mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, dan 129 perunggu. Sehingga beberapa guru dari negara Eropa belajar sains kepada Indonesia.

Kendati demikian, ada permasalahan lainnya yang cukup mendasar bagi sistem pendidikan nasional yakni menuju era globalisasi ekonomi dan teknologi. Kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi dari dampak globalisasi ini memberikan kesadaran dan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku dan budaya di Indonesia. Masyarakat Indonesia semakin terintegrasi dan saling berhubungan dengan masyarakat dari belahan dunia lainnya. Dunia semakin terbuka dengan budaya-budaya baru dan asing. Akan tetapi efek atau implikasi globalisasi yang cenderung vulgar akan menggerus perilaku dan budaya lokal, jika mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia masih dalam taraf *follower*, tidak *up to date*, dan masih agak terbelakang. Padahal pendidikan formal maupun informal menjadi penopang sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi implikasi globalisasi ini. Agar anak bangsa Indonesia tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain. Permasalahan standarisasi pengajaran, sarana dan prasarana infrastruktur masih rendah, kualitas guru

masih jauh dari harapan, kemudian kesejahteraan guru dan kesempatan pemerataan pendidikan masih rendah, ditambah mahalnnya biaya pendidikan. Semua permasalahan ini harus segera diatasi pemerintah agar pendidikan di Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara di Asean. (Musrida, 2013).

### **Pemetaan (*Mapping*) dan Pemecahan Masalah (*Problem Solving*) Pendidikan Karakter Pembinaan Sekolah Menengah Atas**

Berbagai tantangan dan permasalahan terhadap pendidikan di Indonesia memang bukan hal baru, bahkan menjadi sebuah “alat politik” dan program kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Sistem dan program pendidikan silih berganti ketika pemerintahnya pun berganti. Tidak ada standar baku dalam sistem pendidikan, dengan dalih sebagai revitalisasi sistem pendidikan yang harus *up to date*, untuk mengikuti perkembangan dunia internasional yang semakin ketat persaingannya.

Sebuah pendidikan baik formal maupun informal, merupakan proses panjang yang terus terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk mengubah jati diri seorang siswa (peserta didik) untuk lebih maju dan berkembang dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan dunia pendidikan yang terus berubah secara signifikan, telah merubah pola pikir banyak orang, dari pola pikir yang masih sederhana menjadi lebih modern. Hal ini sangat berpengaruh pada kemajuan pendidikan di

Indonesia.

Era globalisasi sebagai era terintegrasinya sebuah sistem ekonomi, budaya, sosial, dan komunikasi antar masyarakat dunia. Telah menjadikan sebuah tantangan yang berat bagi pemerintah, begitupula dengan pihak pengajar (guru) yang berupaya memperbaiki sistem pendidikan nasional, agar peserta didik di sekolah-sekolah mampu mengikuti dan mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari dan dipahami dalam mata pelajaran. Namun dalam penelitian ini, tantangan yang paling krusial yang dihadapi dalam sistem pendidikan nasional kita adalah pendidikan karakter.

Tuntutan untuk melaksanakan pendidikan karakter bagi siswa-siswi di sekolah-sekolah karena beberapa tahun belakangan ini beberapa kasus dan peristiwa yang melibatkan siswa-siswi sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah Atas (SMA). Seperti kasus *bullying*, narkoba, tawuran, geng motor, pemerasan, hingga membunuh di beberapa kota di Indonesia. Menjadikan pendidikan nasional tercoreng oleh perilaku oknum siswa tersebut. Sebenarnya juga para pakar pendidikan mengatakan permasalahan yang terjadi dengan siswa di dalam dan di luar sekolah, tidak melulu menjadi tanggungjawab pihak sekolah, namun keluarga juga turut bertanggungjawab.

Begitu krusialnya menekankan pendidikan karakter pada siswa-siswi di sekolah karena semakin terdegradasinya karakter bangsa yang mengemuka belakangan ini seperti memudarnya sikap toleran dan

menghormati nilai-nilai pluralisme sehingga kekerasan begitu mudah terjadi. Anomali sosial dan anarkisme seperti tawuran, perusakan fasilitas publik, penipuan, *bullying*, hingga tindakan penyimpangan moral lainnya menjadi bukti konkret memudarnya nilai-nilai luhur dan terdegradasinya karakter yang selama ini melekat pada bangsa ini sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketimuran.

Dunia pendidikan dianggap pihak yang paling bertanggungjawab terhadap gejala tersebut. memang tidak salah dan amat wajar. Sebab institusi-institusi lain dibandingkan dengan institusi pendidikan merupakan yang paling sarat makna. Pendidikan merupakan pintu masuk untuk mengantarkan peserta didik menjadi manusia berbudi pekerti luhur, berbudaya, berilmu pengetahuan, berketerampilan, berperadaban, dan berkarakter. Begitu penting misi ini, pendidikan tidak bisa hanya untuk mengejar nilai tertinggi dalam ujian (ijazah) dalam ujian nasional, meraih gelar tertinggi. Yang paling penting dan substansif adalah proses pemanusiaan secara utuh, meliputi aspek jiwa, intelektual, emosi, hingga spiritualnya. Dalam menghadapi tantangan perubahan dunia yang semakin terintegrasi dengan sistem ekonomi, politik, budaya, dan sosial negara lain dalam era globalisasi.

Pembentukan karakter terhadap peserta didik dan juga pengajar dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya, merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I UU Sisdiknas tahun 2003 menyatakan di antara tujuan pendidikan

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama.

Shita Wardhani Singgih sebagai pembicara dalam seminar pendidikan karakter yang diselenggarakan Universitas Siliwangi, yang ditemui peneliti secara langsung pada tanggal 3 Desember 2013, mengatakan dalam membangun karakter seorang siswa, pihak sekolah perlu memperhatikan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di era globalisasi ini, banyak sekolah yang sudah jarang sekali menerapkan nilai-nilai luhur yang berkaitan dengan falsafah Pancasila, sehingga hubungan antara guru dan siswa tidak begitu akrab.

Pengamat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Himpunan Pengembangan Kepribadian Indonesia (HIMPRI) DKI Jakarta masa bakti 2005-2010 menambahkan, Begitu juga dengan banyaknya siswa yang acuh tak acuh dengan keberadaan guru, tidak menghormati guru, dan lain-lain. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu memperhatikan pembinaan sikap dan karakter masing-masing siswa dengan cara membina dan meningkatkan intelektualisme dan profesionalisme. Selain itu, pihak sekolah juga dapat menerapkan nilai-nilai karakter pada siswa dengan

membuat aturan dan tata tertib yang dapat menumbuhkan karakter-karakter baik, misalnya dengan membuat kantin kejujuran. Dalam hal ini, sekolah dapat menumbuhkan karakter kejujuran pada setiap siswa.

Pentingnya pendidikan dan pengembangan budaya karakter, menurut Prof. Dr. H. Yus Darusman., M.Si. salah satu Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Siliwangi Tasikmalaya, tantangan besar dalam era globalisasi bangsa ini harus mampu bersaing dengan bangsa lain, kunci sukses dalam menghadapi tantangan berat ini adalah sumberdaya manusia yang handal dan berbudaya, oleh karena itu peningkatan kualitas SDM sejak dini merupakan hal penting yang harus dipersiapkan. Karakter bangsa merupakan aspek yang penting dari kualitas sumberdaya manusia karena kualitas dan karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina, masa remaja merupakan masa yang kritis bagi pembentukan karakter seseorang.

Sepuluh tanda tanda zaman yang harus diwaspadai, Thomas Lickona, mengungkapkan tanda sebuah bangsa akan menuju kehancuran jika: 1) Meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, 2) Penggunaan bahasa dan kata kata buruk, 3) Pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, 4) Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, seks bebas, 5) Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, 6) Menurunnya etos kerja, 6) Semakin rendahnya rasa hormat

terhadap orang tua dan guru, 7) Rendahnya rasa tanggung jawab, 8) Membudayanya ketidakjujuran, dan 9) Adanya saling curiga dan kebencian diantara sesama.

Institusi pendidikan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya karakter Pendidikan Nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia : 1) Yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2) Berakhlak mulia, 3) Sehat, 4) Berilmu, 5) Cakap, 6) Kreatif, 7) Mandiri, dan 8) menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter yang efektif bersumber dari agama, dan merupakan bagian integral yang sangat penting dalam pendidikan nasional. Pendidikan karakter bangsa merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan orang tua. Begitu pula peran serta guru dalam pembangunan karakter peserta didiknya tidak hanya akan berpengaruh pada lingkup lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu, para guru harus meningkatkan dan mengembangkan keprofesionalan profesinya.

Bagi siswa antara sekolah dengan sekolah sebelumnya merupakan dunia baru. Untuk pelajar tingkat lanjutan atas (SMA) diarahkan dan dihadapkan kepada studi lanjutan pasca SMA. Jelas kondisinya berbeda dengan suasana belajar sebelumnya, disamping itu siswa dihadapkan pada bidang

studi tertentu yang menjadi pilihannya yang relatif lebih khusus, oleh karena itu siswa harus lebih jelas apa tujuannya mendalami jurusan atau program studi yang diinginkan, disinilah peran sang guru mengarahkan peserta didiknya, andaikan seorang siswa mendalami ilmu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, siswa diarahkan mendalami menjadi calon guru yang berkarakter, berakhlak mulia.

Namun menurut Prof YUS maupun Sita Wardani, semua tujuan pendidikan apapun program studi atau pendidikannya nanti pasca SMA harus dibekali atau diisi oleh nilai-nilai dan pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter ini untuk menindaklanjuti peraturan perundangan tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 tahun 2011. Ditambah lagi dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang mengamanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum dengan cara menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Instansi pendidikan mampu meluluskan siswa yang bertaqwa, berkarakter, berkepribadian, cerdas, berintegritas tinggi, jujur, mandiri, dan bertanggungjawab. Pihak guru dan instansi pendidikan berkonsentrasi dalam hal pengembangan dan pengimplementasian pendidikan karakter serta pembinaan kultur, budaya organisasi, kegiatan kesiswaan,



dan kegiatan keseharian di sekolah.

Sita Wardhani Singgih mengatakan, memang sebuah kesuksesan seseorang tidak bisa ditentukan oleh salah satu pembelajaran, namun harus terintegrasi dengan pendidikan karakter dan agama. Pendidikan karakter ini merupakan solusi yang tepat untuk menjadikan generasi muda atau siswa yang berkarakter, bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya menjunjung tata krama dan sopan santun di dalam pergaulan di tengah masyarakat baik dalam sekolah maupun luar sekolah. Para guru tidak hanya menganggap dirinya sebagai seorang pengajar, namun yang lebih penting hendaknya memosisikan dirinya sebagai patron memiliki karakter yang bermartabat dalam menciptakan peserta didik yang handal dan berbudi, berakhlak mulia Pembelajaran karakter menanamkan dan memupuk budi pekerti luhur yang bersumberkan dari nilai-nilai agama, hukum, dan tata krama yang seharusnya dijunjung tinggi di tengah masyarakat sesuai dengan kaidah keilmuan termasuk di dalamnya tata krama kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik (wawancara, 3 Desember 2013).

Para guru diharapkan mampu dalam menterjemahkan arti kebebasan berpendapat di dalam kelas, baik dalam berbicara, bertindak hendaklah memperlakukan para siswa dengan bijaksana, saat ini masih banyak para siswa yang ketakutan untuk berbeda pendapat dengan gurunya, asalkan perbedaan pendapat tersebut diiringi dengan informasi, data, dan fakta. Kemudian menghargai perbedaan perspektif dalam

memandang sesuatu. Disinilah pentingnya pendidikan karakter, melalui pendidikan karakter ini guru maupun siswa akan diingatkan kembali 9 (sembilan) pilar pendidikan karakter yakni : 1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan Nya, 2) Tanggung Jawab, kedisiplinan, dan kemandirian, 3) Kejujuran / amanah dan arif, 4) Hormat dan santun, 5) Dermawan, suka menolong, 6) Percaya diri, kreatif dan pekerja keras, 7) Kepemimpinan dan keadilan, 8) Baik dan rendah hati, dan 9) Toleransi, kedamaian dan kesatuan.

### **Penerapan Kegiatan Karakter di Sekolah Menengah Atas di Kota Tasikmalaya**

Situasi dan kondisi pendidikan di Kota Tasikmalaya tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Jawa Barat, ataupun di wilayah Indonesia lainnya. Namun situasi sosial dan budaya jelas memiliki karakteristik berbeda antar wilayah, akan tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan jika berbicara karakter dan nilai-nilai karakter dalam masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan perilaku menyimpang masyarakat Indonesia, meskipun memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Beberapa peristiwa dan kasus yang terjadi di masyarakat sama, begitu juga dengan permasalahan kenakalan remaja atau beberapa kasus yang menimpa pelajar di Indonesia seperti tawuran, bullying, narkoba, dan penyimpangan lainnya.

Dengan penelitian ini berupaya memetakan kembali dan memecahkan masalah yang sudah diuraikan pada latar belakang tentang pendidikan karakter. Penelitian yang dilakukan beberapa sekolah

di Kota Tasikmalaya ini diharapkan mampu memberikan informasi dan data bagi institusi pendidikan dan pemerintah, terhadap permasalahan yang terjadi di kalangan pelajar di beberapa wilayah Indonesia.

Berbagai persoalan yang menimpa di Kota Tasikmalaya, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Banyak kalangan mewacanakan pentingnya pendidikan karakter. Penambahan mata pelajaran agama di sekolah. Siswa diberi pelatihan spiritual quotient (SQ) sebagai upaya memperkuat dimensi spiritual yang dapat mengontrol tubuh yang liar, agresif, dan pembunuh.

Cara pemecahan masalah ini mengandung kelemahan serius. Pertama, pendidikan agama, spiritualitas, atau pendidikan karakter dipersepsi sebagai yang memiliki daya magis mengubah perilaku. Padahal tidak ada jaminan bahwa pengetahuan akan apa yang baik mampu mentransformasi secara otomatis perilaku baik dan bermoral. Dalam arti itu, usulan menambah jam pelajaran agama, etika, spiritualitas atau bahkan menghapus semua subjek pengajaran dan menggantinya dengan agama dan moral tetap tidak menjamin terjadinya perubahan perilaku.

Kedua, berbagai kebijakan saat ini yang bertujuan mengatasi masalah kekerasan siswa umumnya bersifat reaktif dan tidak komprehensif. Kebijakan reaktif dimaksud sebagai usaha mengatasi suatu masalah segera setelah masalah itu terjadi. Memang kebijakan reaktif mampu memecahkan suatu masalah saat ini, tetapi tetap tidak tahan lama. Ini karena watak

reaktif dari pemecahan masalah yang tidak mempertimbangkan secara serius faktor-faktor pemicu kekerasan seperti pewarisan kekerasan internal (dari senior ke junior), ketidaktegasan sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan, terbatasnya sarana publik yang dapat menampung dan menyalurkan energi berlebih para siswa, dan semacamnya. Supaya tidak reaktif dan pragmatis, penyelesaian masalah harus bersifat interdisipliner, dan bukan menumpukkan beban hanya kepada pendidikan karakter atau agama.

Ketiga, cara pemerintah mengatasi masalah saat ini mengesankan bahwa kebijakan-kebijakan mereka tidak didukung oleh data dan hasil penelitian. Selama ini publik tidak tahu apakah pendidikan agama atau karakter yang diterapkan di sekolah memang mampu mencegah perilaku agresif dan kriminal para siswa. Penelitian-penelitian ilmu sosial mengenai kekerasan siswa yang mampu mengungkap akar kekerasan (jika ada) seharusnya dipakai pemerintah untuk merekayasa model-model sekolah serta pembelajaran yang ramah dan cinta damai. Jika belum ada penelitian sosial tentang perilaku agresif dan kekerasan siswa, pemerintah wajib mengadakannya. Sekali lagi, ini penting untuk mencapai penyelesaian masalah yang komprehensif.

Di lain pihak, kelompok anti-substansialis berpendapat bahwa pendidikan karakter, agama atau etika tetap harus diajarkan sebagai disiplin ilmu yang mampu membentuk akhlak mulia. Kelompok ini percaya pada filsafat pendidikan yang

menyamakan begitu saja ”mengetahui yang baik” dengan ”bertindak baik” tanpa mempertimbangkan kenyataan bahwa ada peserta didik yang perilakunya masih jauh dari kategori bermoral. Bahwa mereka yang belum terbiasa bertindak secara moral harus dibiasakan sampai pada level watak mulia sebagai keutamaan.

Pertanyaannya apakah kekerasan antarsiswa dapat diatasi dengan pendekatan substansialis atau anti-substansialis, kedua pendekatan tidak begitu mudah dijawab. Sekali lagi kita tidak punya banyak kajian komprehensif dan publikasi ilmiah yang menyediakan informasi memadai perihal pendekatan apa yang paling cocok untuk diterapkan.

Kalaupun kemudian kita mengasumsikan bahwa pendekatan anti-substansialis masih relevan di Indonesia mengingat belum semua guru dan dosen siap menjadi pengajar dan pendidik nilai sekaligus, pelaksanaan pendidikan karakter dan agama tetap terancam gagal membentuk akhlak mulia. Dua alasan dapat dikemukakan. Pertama, tidak jarang pendidikan karakter dan pendidikan agama direduksikan kepada dimensi pengajaran yang hanya mampu mentransfer pengetahuan kognitif. Lebih buruk lagi, pendidikan agama diajarkan secara indoktrinatif sebegitu rupa tanpa mempertimbangkan dimensi historis dan kultural wahyu Ilahi, seakan-akan kemampuan manusia menangkap kehendak Tuhan bersifat melampaui ruang dan waktu. Ini yang menjadi alasan mengapa Tuhan sering diposisikan sebagai pihak yang membenarkan

kekerasan dan balas dendam antarmanusia. Dalam arti itu, aplikasi pendekatan anti-substansialis mengandaikan pentingnya dialog dalam arti sikap kritis dan pengambilan jarak (Larry P. Nucci, 2008) yang terbuka kepada afirmasi doktrin (orang menerima dan mengakui ajaran agamanya) atau penegasian ajaran agama (meninggalkan agama yang ajarannya merendahkan rasionalitas manusia).

Kedua, lingkungan memainkan peran penting dalam proses pembentukan watak. Kita seharusnya takut akan peringatan George Orwell ketika mengatakan, *“I was in a world where it was not possible for me to be good ... Life was more terrible and I was more wicked than I had imagined”* (Larry P. Nucci, 2008). Dunia yang memustahilkan tindakan moral itu adalah dunia yang penuh kekerasan, balas dendam, dan kebencian antarmanusia. Dalam arti itu, George Orwell bisa jadi betul, karena lingkungan penuh kekerasan dan kering kedamaian dapat menyulitkan kita menjadi orang baik secara moral. Dengan kata lain, pendidikan karakter atau agama hanya akan sia-sia ketika kekerasan dan balas dendam menjadi pemandangan yang lazim sehari-hari seolah-olah itu benar berdasarkan justifikasi sosial atau agama.

Bagi penulis, pendidikan karakter dan agama tetaplah penting sebagai pembentuk watak mulia sejauh berbagai kritik dan skeptisisme yang dikemukakan di sini sudah kita atasi bersama. Jika tidak, pendidikan karakter dan agama terpaksa memikul beban yang terlalu berat sebagai agen

pembentuk watak mulia yang kemungkinan besar gagal karena kita tidak mampu menciptakan iklim damai yang memudahkan transformasi perilaku. Untuk itu, problem metodologi serta pilihan pendekatan pendidikan karakter dan agama yang cocok dengan kultur keindonesiaan harus segera kita temukan. Begitu pula dengan upaya menciptakan lingkungan yang semakin bersahabat, compassionate, toleran, dan mengormati kehidupan yang bermartabat.

Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Semua Materi pembelajaran dilakukan dalam rangka mengembangkan kegiatan intervensi. Substansi nilai sesungguhnya secara eksplisit atau implisit sudah ada dalam rumusan kompetensi (SKL, SK, dan KD) dalam Standar Isi (Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah), serta perangkat kompetensi masing-masing program studi di pendidikan tinggi atau PNFI. Yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah memastikan bahwa pembelajaran materi pembelajaran tersebut memiliki dampak instruksional dan/atau dampak pengiring pembentukan karakter. Pengintegrasian nilai dapat dilakukan untuk satu atau lebih dari setiap pokok bahasan dari setiap materi pembelajaran. Seperti halnya sikap, suatu nilai tidaklah berdiri sendiri, tetapi berbentuk kelompok. Secara internal setiap nilai mengandung elemen pikiran, perasaan, dan perilaku moral yang secara psikologis saling berinteraksi.

Karakter terbentuk dari internalisasi nilai yang bersifat konsisten, artinya terdapat keselarasan antarelemen nilai.

Sebagai contoh, karakter jujur, terbentuk dalam satu kesatuan utuh antara tahu makna jujur (apa dan mengapa jujur), mau bersikap jujur, dan berperilaku jujur. Karena setiap nilai berada dalam spektrum atau kelompok nilai-nilai, maka secara psikologis dan sosiokultural suatu nilai harus koheren dengan nilai lain dalam kelompoknya untuk membentuk karakter yang utuh. Contoh: karakter jujur terkait pada nilai jujur, tanggung jawab, peduli, dan nilai lainnya. Orang yang berperilaku jujur dalam membayar pajak, artinya ia peduli pada orang lain, dalam hal ini melalui negara, bertanggung jawab pada pihak lain, artinya ia akan membayar pajak yang besar dan pada saatnya sesuai dengan ketentuan.

Praktik pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal dan nonformal bukan hanya menjadi tanggung jawab materi pelajaran Pendidikan Agama atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Inti dari Pendidikan Agama adalah pengembangan nilai iman, takwa, dan akhlak mulia. Adapun inti dari PKn adalah pengembangan akhlak kewarganegaraan (*civic virtue*) yang mencakup kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*), tanggungjawab kewarganegaraan (*civic responsibility*), dan partisipasi kewarganegaraan (*civic participation*).

Selama ini terkesan materi pembelajaran lainnya hanya mengajarkan pengetahuan dari disiplin ilmu, teknologi, atau seni yang menaunginya. Oleh sebab itu, materi pembelajaran lain harus diperkuat dengan

misi pendidikan karakter yang bersifat melekat dalam substansi dan proses keilmuan sebagai dimensi aksiologinya. Oleh karena itu, proses pembelajaran nilai-nilai karakter secara substantif diintegrasikan dalam setiap materi pembelajaran atau antarmateri pembelajaran. Pendidikan selama ini berangkat dari asumsi yang keliru, yaitu bahwa semua masalah di dunia ini telah diketahui dan pendidik mengetahui cara pemecahannya. Jadi, tugas pendidik dipersepsikan hanya menyampaikan masalah serta cara pemecahannya, dan setelah itu pendidikan dianggap selesai. Padahal, masalah itu terus berubah dan mungkin pendidik belum mengetahui, apalagi tahu cara pemecahannya. Belajar tentang ilmu pengetahuan tetap penting, tetapi hal itu kini lebih mudah dilakukan karena banyak sumber informasi yang dapat dipelajari.

Oleh karena itu, pendidikan seharusnya diarahkan untuk membantu peserta didik belajar bagaimana memperoleh ilmu pengetahuan beserta nilai yang diusungnya. Di situ tersirat perlunya karakter sebagai wahana perwujudan dimensi aksiologi. Dari situ dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, teknologi, atau seni; dan bagaimana menggunakannya guna memecahkan masalah kehidupan dengan arif, kreatif, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan umat manusia.

Sinergi antara pendidikan karakter dengan materi pembelajaran harus dirancang, dikembangkan, dan dilaksanakan

secara saling melengkapi. Dalam pengembangan pendidikan karakter, materi pembelajaran dipahami sebagai integrasi pesan dan alat, yaitu sebagai wahana pembudayaan dan pemberdayaan individu. Misalnya, Pendidik Fisika harus sadar bahwa pembahasan materi fisika diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami fenomena alam dari sudut pandang teori fisika, menggali berbagai sumber informasi dan menganalisisnya untuk menyempurnakan pemahaman tersebut, mengomunikasikan pemahaman tersebut kepada orang lain, dan memahami bahwa fenomena seperti itu tidak lepas dari peran Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa.

Pengembangan pendidikan karakter seperti itu, dapat dilakukan melalui aneka model dan metode pembelajaran yang dipilih pendidik secara kontekstual. Misalnya, untuk mengembangkan kecakapan berkomunikasi, pendidik dapat memilih metode diskusi atau peserta didik diminta presentasi. Pengembangan kecakapan bekerja sama, disiplin, dan kerja kelompok dapat dilakukan pada kegiatan praktikum yang dilaksanakan di laboratorium, di lapangan atau di tempat praktik kerja. Yang penting adalah aspek-aspek tersebut sengaja dirancang dan dinilai hasilnya sebagai bentuk hasil belajar pendidikan karakter. Ada banyak cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran, antara lain: mengungkapkan nilai-nilai yang ada dalam materi pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai karakter menjadi bagian terpadu dari materi pembelajaran, meng-

gunakan perumpamaan dan membuat perbandingan dengan kejadian-kejadian serupa dalam hidup para peserta didik, mengubah hal-hal negatif menjadi nilai positif, mengungkapkan nilai-nilai melalui diskusi dan curah pendapat, menggunakan cerita untuk memunculkan nilai-nilai.

Pengembangan nilai karakter dapat dilihat pada dua latar, yaitu pada latar makro dan latar mikro. Latar makro bersifat nasional yang mencakup keseluruhan konteks perencanaan dan implementasi pengembangan nilai/karakter yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan nasional. Secara makro pengembangan karakter dibagi dalam tiga tahap, yakni perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, dikristalisasikan, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain pertimbangan (1) filosofis: Pancasila, UUD 1945, dan UU No.20 Tahun 2003 beserta ketentuan perundang-undangan turunannya; (2) teoretis: teori tentang otak, psikologis, pendidikan, nilai dan moral, serta sosiokultural; (3) empiris: berupa pengalaman dan praktik terbaik, antara lain tokoh-tokoh, satuan pendidikan formal dan nonformal unggulan, pesantren, kelompok kultural, dan lain-lain.

Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan sebagaimana digariskan

sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni dalam satuan pendidikan formal dan nonformal, keluarga, dan masyarakat. Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui dua pendekatan yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukkan karakter dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur. Agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna, peran pendidik sebagai sosok panutan sangat penting dan menentukan.

mbangkan dalam satuan-satuan pendidikan formal dan nonformal sesuai dan selaras dengan kearifan lokal atau nilai-nilai lokal setempat dalam pola-pola yang lebih detail. Misalnya, cara menghormati atau cara bersopan santun kepada orang lain, cara bertata krama, cara pendidik memberikan sanksi kepada murid, dan sebagainya.

Dalam hal ini, perhatian kepada peserta didik menjadi sangat penting sebab mereka yang segera akan turun dalam dunia nyata yang berupa masyarakat. Nilai-nilai semacam itu harus dilakukan berulang-ulang agar menjadi kebiasaan, dan kebiasaan inilah yang akan menjadi budaya setempat. Untuk kepentingan ini maka tiap satuan pendidikan formal dan nonformal, harus memiliki buku saku yang berupa pedoman ringkas sehingga bersifat mengikat sebab disusun dengan kesepakatan bersama. Dengan

demikian maka para murid, para pendidik, para orang tua akan melakukan hal tersebut secara sinergis. Di setiap satuan pendidikan formal dan nonformal akan ada kode perilaku, manajemen tatakrama (*manner management*) serta budaya organisasi yang diperlukan dalam peroses pengembangan karakter tersebut.

### **Simpulan**

Sistem pendidikan nasional menghadapi tantangan globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, komunikasi dan informasi dari dampak globalisasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perilaku dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat semakin terintegrasi dan saling berhubungan dengan masyarakat dari belahan dunia lainnya. Berbagai tantangan terhadap pendidikan di Indonesia memang bukan hal baru, bahkan menjadi sebuah “alat politik” dan program kebijakan pemerintah dari masa ke masa. Sistem dan program pendidikan silih berganti ketika pemerintah berganti. Tidak ada standar baku yang tetap dalam sistem pendidikan, dengan dalih sebagai revitalisasi sistem pendidikan yang harus *up to date*, untuk mengikuti perkembangan dunia internasional yang semakin ketat persaingannya.

Sebuah pendidikan baik formal maupun informal, merupakan proses panjang yang terus terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk mengubah jati diri seorang peserta didik untuk lebih maju dan berkembang dalam ilmu pengetahuan. Perkembangan dunia pendid-

ikan yang terus berubah secara signifikan, telah merubah pola pikir banyak orang, dari pola pikir yang masih sederhana menjadi lebih modern. Hal ini sangat berpengaruh pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

Pembentukan karakter terhadap peserta didik dan juga pengajar dalam dunia pendidikan di Indonesia khususnya, merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal I Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2003 menyatakan di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian dan akhlak mulia. Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama

Dalam penelitian yang dilakukan di Kota Tasikmalaya, pendidikan di Kota Tasikmalaya tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya di Jawa Barat, ataupun di wilayah Indonesia lainnya. Namun situasi sosial dan budaya jelas memiliki karakteristik berbeda antar wilayah, akan tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan jika berbicara karakter dan nilai-nilai karakter dalam masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan perilaku menyimpang masyarakat Indonesia, meskipun memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda.

Pendidikan karakter, agama atau etika tetap harus diajarkan sebagai disiplin ilmu

yang mampu membentuk akhlak mulia. Kelompok ini percaya pada filsafat pendidikan yang menyamakan begitu saja ”mengetahui yang baik” dengan ”bertindak baik” tanpa mempertimbangkan kenyataan bahwa ada peserta didik yang perilakunya masih jauh dari kategori bermoral. Bahwa mereka yang belum terbiasa bertindak secara moral harus dibiasakan sampai pada level watak mulia sebagai keutamaan.

Pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian visi pembangunan nasional seb-

agaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005—2025, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

#### **Daftar Pustaka**

- Denzin, Norman dan Yvoanna S. Lincoln. (2009) *Handbook of Qualitatif Reseserch* (eds). Diterjemahkan oleh Dariyatno, dkk. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. (2007) *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hidayatullah, M.Furqon. (2010) *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*. Surakarta : Yuma Pustaka.
- Islamy, Irfan. (1984) *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kusmayadi, Edi. 2012. *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Bangsa*. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Otonomi Daerah Pendidikan Karakter Bangsa yang dipublikasikan Fakultas Ilmu So-*
- sial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya
- Kaelan. (2010) *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma
- Mulyana, Yoyo dkk. (2011) *Pendidikan Karakter Di Sekolah dari Gagasan ke Tindakan*. Seri Pendidikan Karakter Yayasan Jati Diri Bangsa. Jakarta : Penerbit PT. Elex Media-Komputindo
- Mulyana. (2003) *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deden. (2012) *Manajemen Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembangunan Karakter Bangsa*. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Otonomi Daerah Pendidikan Karakter Bangsa yang dipublikasikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi*



- Tasikmalaya.
- Musfiroh, Tadzkiroatun. (2008) *Memilih, Menyusun dan Menyajikan Cerita Untuk Anak Usia Dini*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Noor, Isran. (2012) *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Bangsa*. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Otonomi Daerah Pendidikan Karakter Bangsa yang dipublikasikan Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya*.
- Sirozi, M. (2005) *Politik Pendidikan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryanto. (2007) *Filsafat Politik Pancasila (Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila)*. Yogyakarta : KEPEL Press
- Rachman, Maman. (2000) *Reposisi, Re-evaluasi, dan Redefinisi Pendidikan Nilai Bagi Generasi Muda Bangsa*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Tahun Ke-7.
- Rifai, Muhammad. (2011) *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta : Penerbit Ar Ruzz Media.
- Ramli, T (2003) *Pendidikan Moral dalam Keluarga*. Jakarta : Grasindo.
- Putra, Fadillah. (2001) *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. (2002) *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressido
- Wahab, A Solichin. (1997) *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- Internet :
- Musrida, Irvan Jaya. (2013) *Permasalahan Pendidikan di Indonesia Beserta Solusinya*. Van88.wordpress.com (internet). Tersedia dalam <<http://van88.wordpress.com/makalah-permasalahan-pendidikan-di-indonesia>> (diakses 10 Agustus 2014)
- Nisa, Janatan. (2014) *Pendidikan Karakter : Peran Sekolah dan Keluarga*. Kompasiana.com (internet). Tersedia dalam <<http://m.kompasiana.com/post/read/675860/2/pendidikan-karakter-peran-sekolah-dan-keluarga.html>> (diakses pada 4 November 2014)
- Wibowo, Timoty. (2013) *Mewujudkan Pendidikan Karakter Yang Berkualitas*. [www.pendidikankarakter.com](http://www.pendidikankarakter.com) (internet). Tersedia dalam <<http://www.pendidikankarakter.com/mewujudkan-pendidikan-karakter-yang-berkualitas>> (diakses pada 4 November 2014).
- Depdiknas, (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional*, diakses pada [www.depdiknas.go.id](http://www.depdiknas.go.id), (diakses pada 17 September 2012)